

PEMETAAN MUTU MADRASAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI PROPINSI RIAU

MAPPING MADRASAH QUALITY IN ACHIEVING NATIONAL EDUCATIONAL STANDARDS IN THE PROVINCE OF RIAU

Sumarsih Anwar

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur
email: sumarsih.anwar@yahoo.com

Naskah diterima 15 September 2014. Revisi 17–30 September 2014. Disetujui 19 November 2014

Abstract

This paper provides the results of a research on the mapping of madrasa quality in achieving National Education Standards (SNP). The research target is Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah), and the sample is province of Riau. The research used questionnaires, coupled with documentation techniques for data-gathering. The findings showed that: 1) The quality of Islamic Senior High School in Riau province generally the same between the public and the private madrasa. 2) There are two aspects, which have significant correlations with the output as of national test, namely educator standards and infrastructure standards. 3) There are a number of enabling and inhibiting factors from within or and outside institutions in the achievement of the National Education Standards. 4) Regarding inhibiting factors, Islamic Senior High School in Riau province has done some efforts in attaining the standard.

Keywords: *Education quality, Islamic senior high school, National Education Standard (SNP), Riau*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang peta mutu madrasah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sasaran penelitian sebagai unit analisis adalah Madrasah Aliyah dengan sampel wilayah Propinsi Riau. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Mutu Madrasah Aliyah di propinsi Riau secara umum relatif sama dan tidak jauh berbeda antara madrasah negeri maupun madrasah swasta. 2) Bila dilihat dari masing-masing aspek SNP, terdapat 2 (dua) aspek yang mempunyai korelasi dengan output (hasil UN), yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan dan standar sarana prasarana. 3) Banyak faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencapaian SNP, baik dari dalam (intern) maupun dari luar (ekstern). 4) Terkait dengan adanya beberapa penghambat, telah dilakukan upaya dalam pencapaian SNP.

Kata Kunci: Mutu pendidikan, Madrasah, Standard Nasional Pendidikan (SNP), Riau

PENDAHULUAN

Secara umum madrasah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki mutu pendidikan yang relatif masih rendah. Hal ini disebabkan karena kondisi madrasah yang kurang memadai dalam beberapa aspek, seperti: keterbatasan sarana prasarana pendidikan, infrastruktur seperti bangunan gedung juga belum memadai bahkan sudah banyak yang rusak, laboratorium dan perpustakaan belum memadai bahkan banyak madrasah yang belum memilikinya.

Persoalan lain penyebab rendahnya mutu pendidikan di madrasah terlihat dalam melakukan pengelolaan pendidikan yang selama ini cenderung kaku, birokratis dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga pengelola tidak/belum mempunyai kemampuan memadai untuk merancang, melaksanakan program dan mengevaluasinya dengan berbasis kualitas, artinya pengelola belum memiliki kemandirian dalam melakukan pengelolaan, belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang benar, belum banyak melibatkan unsur tau pihak lain terkait dsb. Akibatnya, pengelolaan pendidikan belum bisa efektif dan efisien. Padahal sesuai amanat PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya pasal 49 ayat 1 bahwa “pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas”. MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian sekolah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan adalah meliputi perencanaan program, penyusunan KTSP, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar dan pengawasan (<http://mazzbody.Multiplay.com>, 28 Januari 2009. item/8). Dikeluarkannya PP No.19 tahun 2005 tentang SNP bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Adapun fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk dapat mencapai tuntutan kualitas pendidikan tersebut, tentunya madrasah harus berusaha untuk dapat mencapai standar sesuai dengan SNP, yang merupakan unsur pokok keberhasilan pendidikan di madrasah.

Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu jenjang/lembaga pendidikan di madrasah dan sebagai salah satu jenis pendidikan menengah umum, berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, rasa keindahan dan harmoni yang diperlukan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selaras dengan itu, MA ditujukan

untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan ketrampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Guna pencapaian tujuan tersebut, arah pembangunan MA lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan mutu program, peningkatan akses untuk masyarakat marginal atau terpencil, dan peningkatan mutu pelayanan akademik.

Untuk mencapai arah pembangunan dengan kekhasan Islam dimaksud, maka salah satu fokus kinerja kunci sasaran pembangunan MA sampai dengan tahun 2014 adalah meningkatnya keunggulan komparatif dan kompetitif lulusan khususnya dalam bidang keagamaan Islam. Salah satu Indikator kinerja capaian tersebut adalah sebanyak 70% MA telah memenuhi standar SNP (Ditjen Pendis 2009, 51-52).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian pemetaan mutu MA dalam rangka pencapaian SNP melalui penelitian secara mendalam perlu dilakukan. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui tentang gambaran/peta mutu madrasah dalam pemenuhan 8 (delapan) standar sesuai dengan SNP. Di samping itu, peneliti ini diharapkan mampu menggali permasalahan-permasalahan ataupun faktor-faktor penyebab belum tercapainya SNP serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian SNP.

Sesuai dengan pemikiran tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah belum terpetakannya tingkat/kondisi MA dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah: 1) Untuk memetakan mutu Madrasah Aliyah (MA) dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan (SNP), 2) Untuk mengetahui hubungan antara mutu masing-masing standar SNP dengan *output* madrasah, 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pencapaian SNP, dan 4) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pencapaian SNP.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi tentang gambaran peta mutu MA dalam pencapaian SNP. Informasi ini akan bermanfaat untuk melakukan pengelolaan madrasah yang lebih baik sesuai dengan SNP, sehingga sasaran pembangunan MA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, pencapaian standar SNP sebanyak 70% madrasah/lembaga dapat tercapai.

Kerangka Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, 867), pemetaan adalah proses, cara pembuatan membuat peta. Banyak teori tentang tentang konsep mutu dalam konteks pendidikan, salah

satunya adalah yang dikemukakan oleh Syaifuddin, dkk. (2007, 2-8 unit 2), yang berpandangan bahwa pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti: tenaga pengajar, bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru dan materi yang disampaikan), peralatan, dukungan administrasi dan sarana prasarana, biaya, teknologi dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif yang diperlukan dalam proses pendidikan. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (misal: tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misal ujian semester dan Ujian Nasional), dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tanggung jawab sekolah/madrasah dalam *school based quality improvement* bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah/madrasah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan *benchmarking* (menggunakan titik acuan standar, misalnya: UN oleh BNSP, dan nilai ujian akhir semester oleh KKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (*benchmarking*) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah/madrasah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.

Dalam konteks produk dari lembaga pendidikan yang berupa jasa, kepuasan pelanggan (siswa, orang tua, dan masyarakat) dibagi dalam dua aspek, yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang dicapai siswa. Orientasi mutu dari aspek *output* mendasarkan pada hasil pendidikan yang ditunjukkan oleh keunggulan akademik dan non akademik di suatu sekolah/madrasah. Bahkan saat ini, mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, seperti yang tertuang di dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 35 dan PP No.19 tahun 2005 (Syaifuddin, dkk 2007, 2-7).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam UU No.20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi standar nasional pendidikan.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Sedangkan *output* pendidikan merupakan kinerja sekolah/madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses dan perilaku madrasah, khususnya dalam prestasi belajar siswa.

Madrasah adalah lembaga umum berciri khas Islam, diselenggarakan secara formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan dasar sembilan tahun adalah MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang setingkat SD, dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) setingkat SMP. Untuk jenjang pendidikan menengah adalah MA (Madrasah Aliyah) yang setingkat SMA (Ditjen Pendis 2009, ix-x).

Sesuai dengan maksud teori/konsep tentang mutu pendidikan tersebut, maka madrasah dapat dikatakan bermutu tinggi apabila telah mempersiapkan input-nya dengan baik untuk kemudian diproses dengan pengkoordinasian, penyerasian dan pepaduan *input* madrasah yang harmonis sehingga menghasilkan *output* madrasah yang bermutu tinggi.

Terkait dengan judul penelitian, maka yang dimaksud dengan pemetaan mutu madrasah adalah suatu proses penyusunan gambaran/kondisi kualitas madrasah, baik input, proses maupun output pendidikan yang diselenggarakan oleh madrasah.

Ruang lingkup penelitian meliputi 8 (delapan) standar yang tertuang dalam SNP, yang meliputi: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) Standar kompetensi lulusan, 4) Standar pendidik

dan tenaga kependidikan, 5) Standar sarana prasarana, 6) Standar pengelolaan, 7) Standar pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian.

Pencapaian dan Tujuan Penerapan SNP

Istilah pencapaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, 194) berarti proses, cara, perbuatan mencapai. Sedangkan yang dimaksud standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

Pencapaian yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah proses atau perbuatan atau cara yang dilakukan madrasah untuk mencapai standar SNP. Penerapan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Penerapan standar menjadi isu penting dalam sistem penjaminan mutu agar proses pengelolaan pendidikan mengarah pada tujuan dan penerapan standar dapat memastikan bahwa pendidikan dapat meningkatkan daya kolaborasi dan kompetisi bangsa di tengah perkembangan global.

Keberhasilan madrasah dalam mencapai mutu pendidikan yang diselenggarakannya, tidak terlepas dari mutu input, proses maupun outputnya. Dan selanjutnya, mutu pendidikan tidak terlepas dari mutu pencapaian SNP-nya. Oleh karena itu pemetaan mutu madrasah menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian SNP.

Dengan terpetakannya mutu madrasah dalam pencapaian SNP, akan memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkompeten (penentu kebijakan) dalam pengembangan dan peningkatan kualitas madrasah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lembaga.

Selanjutnya, dengan semakin tinggi mutu pencapaian SNP, maka akan semakin tinggi pula mutu pendidikannya. Sebaliknya, semakin rendah mutu pencapaian SNPnya, maka akan semakin rendah pula mutu pendidikannya (*output*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di 1 (satu) propinsi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Propinsi Riau. Dipilihnya Propinsi Riau, karena secara geografis letaknya di tengah-tengah pulau

Sumatera, dan identik dengan kebudayaan Melayu. Di samping itu, dari informasi dan beberapa kajian sebelumnya, bahwa karakteristik "kualitas" madrasah di wilayah Riau hampir setara dengan karakteristik madrasah di beberapa propinsi lainnya yang berada di pulau Sumatera. Sehingga dengan adanya peta mutu madrasah di propinsi Riau, akan memberikan gambaran yang "relatif setara" dengan mutu madrasah di beberapa propinsi lainnya di Pulau Sumatera. Waktu penelitian ini sejak dari persiapan sampai pembuatan laporan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, mulai bulan Mei sampai Oktoberr 2011. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. Sesuai dengan metode tersebut, maka jenis penelitian adalah kuantitatif dengan didukung oleh kualitatif.

Sasaran penelitian adalah Madrasah Aliyah (MA) negeri dan MA swasta. Oleh karena itu, populasi penelitian ini adalah seluruh MA negeri dan swasta yang berada di propinsi lokasi penelitian. Jadi, unit analisis penelitian adalah madrasah/lembaga. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling* secara proporsional karena populasi penelitian bersifat heterogen dan berstrata. Dalam hal ini strata dilihat dari status kelembagaan dan status akreditasi.

Jumlah MA di Propinsi Riau sebanyak 232 MA dengan rincian sebagai berikut: 1) Akreditasi A (10 MA), 2) Akreditasi B (49 MA), 3) Akreditasi C (67 MA), 4) Tidak Terakreditasi atau TT (28 MA), dan 5) Belum Terakreditasi atau BT (8 MA).

Dengan menggunakan rumus dari Burhan Bungin (2009, 105), dengan jumlah populasi (N) sebanyak 236 MA dan menggunakan taraf kesalahan (e) sebesar 5%, maka diperoleh sampel sebanyak 148 (dibulatkan menjadi 149). Dengan rincian sebagai berikut; 1) Status Akreditasi A (8 MA), 2) Status Akreditasi B (32 MA), 3) Status Akreditasi C (44 MA), 4) Status Akreditasi TT (20 MA), dan 5) Status Akreditasi BT (26 MA).

Kuesioner yang terkumpul ternyata melebihi jumlah sampel yang telah ditentukan (150 kuesioner), yaitu 162 kuesioner. Hal itu disebabkan karena terdapat beberapa madrasah yang minta juga untuk dijadikan sasaran penelitian.

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu mutu madrasah (capaian SNP) dan mutu pendidikan (*out put*), dalam hal ini adalah hasil Ujian Nasional (UN).

Instrumen penelitian adalah kuesioner, yang dimaksudkan untuk menggali data tentang pencapaian SNP. Di samping itu, juga dilakukan studi dokumentasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner diberikan kepada responden (lembaga) untuk dijawab dengan benar; wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dilakukan untuk menjaring data kualitatif tentang persoalan yang dihadapi madrasah dalam rangka pencapaian SNP. Studi dokumentasi dilakukan untuk mempertajam analisis. Sumber

data penelitian adalah unsur lembaga, yang meliputi: guru, kepala, tenaga TU dan pengawas serta berbagai dokumen pendukung.

Data yang telah terkumpul melalui kuesioner dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif statistik*. Sedangkan data kualitatif berupa hasil wawancara digunakan untuk memperkaya analisis data kuantitatif. Di samping dengan analisis deskriptik statistik, analisis dilakukan juga teknik analisis korelasional dan komparasional, yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perbedaan dan hubungan antara mutu pencapaian SNP dengan *out put* (hasil UN).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Propinsi Riau terdiri dari beberapa kota dan kabupaten, namun demikian jumlah kotanya lebih sedikit dibanding kabupaten. Hanya ada 2 (dua) kota di Propinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sehingga wajar jika jumlah madrasah (MA) di kota lebih sedikit dari pada di kabupaten.

Terkait dengan status akreditasi, terdapat 56 (lima puluh enam) madrasah yang belum terakreditasi dan 6 (enam) madrasah yang tidak terakreditasi. Setelah dilakukan pengecekan, kebanyakan madrasah yang belum dan tidak terakreditasi tersebut, karena kondisinya belum memadai baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Di samping belum memadai dan belum memenuhi kriteria akreditasi, baik dari Badan Akreditasi Propinsi maupun Badan Akreditasi Nasional, sebagian berdirinya masih baru dan belum meluluskan alumninya.

Peta Mutu Madrasah Aliyah di Propinsi Riau

Mencermati mutu madrasah yang ada di Propinsi Riau, dari semua daerah baik kota maupun kabupaten tidak satupun yang termasuk karegori A (sangat baik), tidak jauh berbeda antara kualitas madrasah di kota dengan madrasah di kabupaten. Kondisi tersebut memberi gambaran, bahwa kualitas pendidikan di madrasah baik di pedesaan, pinggiran maupun di perkotaan relatif seimbang. Artinya, walaupun dengan kondisi dan keadaan lingkungan yang “di bawah” perkotaan, namun tanggung jawab pengelola pendidikan tidak lebih rendah dari yang berada di perkotaan. Oleh karena itu, selayaknya mutu madrasah baik di kota maupun di kabupaten sama-sama perlu mendapat perhatian yang serius, dan harus selalu terus ditingkatkan, sehingga nantinya kualitas madrasah diharapkan bisa sejajar dengan kualitas sekolah umum.

Perbedaan dan Korelasi antara Standar Dengan Output

1. Perbedaan Hasil *Output*

Letak geografis antara kota dengan kabupaten ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *output*. Walaupun, fasilitas dan sarana prasarana di kota lebih memadai dibanding di kabupaten, namun hal itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil UN. Begitu juga dengan perbedaan status lembaga, baik yang statusnya negeri maupun swasta tidak menunjukkan perbedaan hasil UN. Menurut para pengelola madrasah swasta, perbedaan status tidak menjadikan kinerja dan motivasi para SDM-nya menurun. Justru, mereka ingin menunjukkan bahwa dengan status yang dimiliki dan dengan kondisi yang relatif kurang memadai, bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap *output*-nya dan tidak jauh berbeda dengan yang statusnya negeri.

Status akreditasi madrasah, ternyata juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil UN. Padahal, sebagaimana yang diharapkan oleh kalangan masyarakat, bahwa dengan meningkatnya status lembaga akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap output. Lebih lanjut, selayaknya semakin baik/tinggi mutu madrasah, maka akan semakin tinggi/baik pula output yang dicapai. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa status lembaga tidak memberikan jaminan terhadap kualitas hasil UN (perlu kajian lebih lanjut).

2. Korelasi antar Variabel

Antar kedelapan komponen SNP mempunyai korelasi yang signifikan. Nilai keeratan paling tinggi terdapat antara komponen isi dan proses. Artinya, kedelapan komponen SNP saling berhubungan dalam pencapaian mutu suatu lembaga pendidikan termasuk madrasah

Sementara itu, antara wilayah kota maupun kabupaten tidak berpengaruh terhadap mutu madrasah. Artinya, daerah kota yang pada umumnya fasilitas pendidikannya lebih baik dan lebih lengkap dari pada di daerah kabupaten tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kualitas madrasah.

Perbedaan Mutu Berdasarkan Status Kelembagaan Dan Lokasi

Status kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap mutu madrasah berdasarkan pencapaian SNP, di mana mutu MAN lebih baik dibandingkan dengan madrasah swasta. Artinya, dengan kondisi dan sarana prasarana yang memadai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu madrasah. Dengan kelengkapan sarana prasarana yang memadai serta didukung SDM yang berkompeten memberikan pengaruh dalam pencapaian SNP, yang meliputi standar isi,

kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan serta standar penilaian.

Hasil tersebut memang selayaknya dicapai oleh madrasah berstatus negeri, karena semua fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran lebih lengkap dan tersedia dibanding madrasah swasta, yang harus mandiri untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.

Faktor lokasi menunjukkan perbedaan mutu yang signifikan. Artinya perbedaan masing-masing lokasi daerah mempunyai mutu yang berbeda. Analisis sebelumnya, antara kota dengan kabupaten tidak menunjukkan perbedaan mutu madrasah, namun setelah dianalisis per kabupaten/kota menunjukkan perbedaan mutu yang signifikan. Artinya, lokasi suatu daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu madrasah. Misal di kota Pekanbaru, mutu madrasah nya lebih baik dari madrasah di daerah yang lain, seperti: Kampar, Pelelawan dan Kuantan Singingi.

Perbedaan Status Akreditasi dan Mutu

Perbedaan status akreditasi menunjukkan perbedaan mutu yang signifikan. Status akreditasi madrasah, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, bahwa status akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu. Semakin baik/tinggi status akreditasi madrasah, maka akan semakin tinggi/baik pula mutu yang dicapai. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak yang berkompeten (baik pemerintah maupun masyarakat) untuk berusaha terus meningkatkan kualitas pendidikan, baik peningkatan SDM maupun fasilitas dan sarana prasarana.

Korelasi antara Mutu dengan *Output* (Hasil UN)

Antara mutu dengan *output* madrasah menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan, terutama pada tahun 2008 – 2010. Namun *output* tahun 2011 mempunyai hubungan secara signifikan dengan mutu madrasah (capaian SNP).

Pada tahun 2008, secara umum baik untuk jurusan IPA maupun IPS tidak terdapat korelasi antara capaian SNP dengan *output* (hasil UN). Tidak ada satu pun aspek SNP yang mempunyai korelasi dengan *output*. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya (2009, 2010 dan 2011) khususnya jurusan IPA tidak ada korelasi antara mutu madrasah dengan *output*. Namun untuk jurusan IPS terdapat korelasi, yaitu aspek proses, tenaga pendidik dan kependidikan serta penilaian (2009), aspek kelulusan dan tenaga pendidik dan kependidikan (2010), dan aspek pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana (2011) dengan *output*.

Lain halnya dengan jurusan IPS, secara umum terdapat korelasi antara mutu dengan *output*. Bila dilihat dari masing-masing aspek SNP, hanya terdapat 2 (dua) aspek yang mempunyai korelasi dengan *output*, yaitu standar pendidik dan kependidikan serta standar sarana prasarana. Pendidik, memang faktor utama yang sangat berperan dalam proses pembelajaran. Bila ditarik garis lurus, maka dengan adanya pendidik yang berkompeteren akan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas.

Pendidik memang faktor utama dalam proses pembelajaran. Tanpa pendidik yang berkompeteren, disiplin ilmu yang relevan ataupun kinerja guru yang tinggi, proses pembelajaran tidak akan menghasilkan *output* yang maksimal. Dengan kondisi pendidik yang berkualitas akan memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar, termasuk hasil UN yang dicapai.

Sarana prasarana tidak melihat tingkat keefektifan pemakaiannya juga memiliki korelasi dengan *output* terutama untuk jurusan IPS. Walaupun dengan sarana prasarana seadanya, tapi mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang penting, bagaimana penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak harus lengkap ataupun mahal. Sehingga dapat dikatakan, kelengkapan sarana prasarana bukan menjadi faktor utama dan jaminan dalam pencapaian *output*. Di sisi lain, tidak adanya keterkaitan sarana prasarana dengan *output* khususnya jurusan IPA. Hal itu memang sulit dicari penyebabnya, sebagaimana pencapaian nilai UN dari sebagian siswa. Dalam keseharian, siswa yang tergolong pandai dan selalu memperoleh hasil yang baik, tapi nilai UN yang diperolehnya justru lebih rendah dari pada siswa yang dalam kesehariannya dapat dikatakan “biasa-biasa saja”, dan bahkan tidak jarang terdapat siswa-siswa pintar tidak lulus UN.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian SNP

Banyak faktor pendukung dalam upaya pencapaian SNP, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia: a) Komitmen para guru yang cukup besar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, b) Komitmen dan kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolah untuk menghasilkan *output* yang maksimal, dengan menyelenggarakan bimbingan belajar ataupun remedial bagi siswa.
2. Pihak eksternal: a) Terjalannya hubungan yang baik dengan *stakeholder* dan masyarakat sekitar, b) Program sertifikasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru.

Sebagaimana faktor pendukung dalam upaya pencapaian SNP, faktor penghambat juga berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia: a) Adanya sebagian guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, b) Rendahnya kinerja guru, c) Masih adanya *mismatch* antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, d) Kelebihan guru dalam mata pelajaran tertentu, dan e) Sebagian siswa adalah “pelarian/sisa” dari sekolah lain.
2. Sarana prasarana: a) Sarana prasarana yang kurang memadai (seperti: perangkat komputer, perangkat dan ruang praktikum IPA, bahan ajar, buku di perpustakaan, dsb.), b) Kondisi keuangan yang sangat terbatas, dan c) Terbatasnya informasi tentang KTSP karena menginduk kepada madrasah lain
3. Substansi; a) Menurunnya hasil UN dari Jurusan Bahasa setiap tahunnya, b) Jurusan Agama semakin tidak diminati oleh siswa, dengan alasan kalau mengambil jurusan agama maka akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi umum.
4. Eksternal: a) Rendahnya kepedulian dari para alumnus untuk mengabdikan ilmu kepada almamaternya, b) Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (BAN maupun BAP) tentang pemenuhan/pencapaian SNP, serta lambannya informasi terkait dengan pencapaian SNP, c) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan rendahnya minat masyarakat (orang tua) untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, d) Kurangnya bantuan dari pemerintah, baik sarana maupun lainnya (spt.: tidak adanya pelatihan bagi guru-guru terutama guru yang mengajar di madrasah swasta), dan e) Sulitnya transportasi antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Upaya Dalam Pencapaian SNP

Berbagai upaya telah dilakukan oleh madrasah dalam rangka pencapaian SNP, dan bentuknya bervariasi, tergantung pada standar-standar yang perlu mendapat perhatian serius/khusus. Upaya-upaya tersebut adalah: 1) Mengembangkan pembelajaran berdasarkan ketentuan dan kriteria yang ada dalam KTSP, 2) Transparansi manajemen keuangan dengan *stakeholder* untuk mencapai satu kesepahaman, 3) Pengadaan dan penambahan sumber belajar, 4) Penambahan jam belajar (bimbingan belajar) terutama bagi siswa kelas XII, 5) Mengikutsertakan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar, 6) Melibatkan para alumni untuk memberikan bimbingan belajar dan seleksi masuk perguruan tinggi, 7) Menjalin kerjasama dengan lembaga yang

berkompeten untuk mengadakan *try out* dalam rangka menghadapi UN maupun masuk perguruan tinggi, dan 8) Mensoasialisasikan program pembelajaran kepada orang tua siswa.

Respon Terhadap Hasil Akreditasi

Respon madrasah terhadap hasil akreditasi, dari beberapa madrasah yang telah memperoleh status akreditasi, menyatakan bahwa status akreditasi yang telah dicapai masih jauh dari harapan. Hal itu disebabkan, karena pencapaian dari masing-masing standar tidak/belum seimbang. Namun demikian, hasil tersebut tidak menyurutkan langkah untuk meningkatkan kualitasnya. Di samping itu, dengan diketahui kualitas dari masing-masing standar, memberikan kemudahan dalam memfokuskan perbaikan dan peningkatan dari standar-standar yang capaiannya masih rendah.

Status akreditasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa lembaga bersangkutan telah memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, perlu dievaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan. Lebih lanjut, dengan hasil akreditasi yang telah diperolehnya akan mendorong untuk terus menerus meningkatkan kualitas dan mempertahankan mutu yang telah diraihinya.

Dengan adanya akreditasi, maka akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara pendidikan. Selain itu, hasil akreditasi juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari lembaga/instansi lain. Karena mutu lembaga pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik, mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak atau laporan kinerja lembaga pendidikan bersangkutan, yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang telah ditetapkan.

Namun demikian, ketentuan akreditasi juga mendapatkan sorotan *negatif/miring*. Pihak yang berpandangan negatif mengemukakan, bahwa akreditasi hanya akan membuka celah untuk seseorang/oknum untuk melakukan korupsi dan kolusi, sebagai upaya untuk menaikkan kelas akreditasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa akreditasi tidak berorientasi pada masa depan dan terkesan tidak berwawasan.

Respon Terhadap UN

Respon madrasah terhadap UN cukup positif. Beberapa madrasah menyambut baik program pemerintah dengan menaikkan standar kelulusan UN setiap tahun. Respon positif tersebut diwujudkan dengan adanya bimbingan belajar sebagai upaya untuk mencapai kelulusan 100%. Respon terhadap hasil UN yang telah dicapai oleh anak didik, diantaranya adalah

dengan memberikan apresiasi terutama bagi siswa yang mencapai nilai tinggi dan minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di samping itu, untuk mencapai hasil yang lebih baik dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan UN, sehingga kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan UN dapat *dieliminir*.

Namun yang cukup memprihatinkan, yaitu adanya sejumlah siswa yang memperoleh nilai kelulusan UN tinggi tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, lantaran ketidakmampuan ekonomi dari orang tuanya. Hasil tersebut memberikan dampak negatif terhadap motivasi guru untuk meningkatkan kelulusan siswa. Bahkan timbul *statement*, bahwa hasil UN tidak menjamin siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah adanya beberapa kasus di madrasah, yaitu adanya siswa yang dalam kesehariannya termasuk pintar tapi justru hasil UN-nya rendah. Di samping itu, terdapat pula siswa yang nilai UN-nya tinggi, namun pada waktu ujian akhir madrasah (UAM) mendapat nilai rendah. Hal itu disebabkan, karena pelaksanaan UN lebih dulu dari pada ujian akhir madrasah, sehingga semangat/motivasi siswa untuk belajar menurun.

Peningkatan Mutu Madrasah

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara umum mutu Madrasah Aliyah berada dalam kategori cukup. Artinya, belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan maksimal. Dilihat dari berbagai faktor, baik itu faktor lokasi, status lembaga maupun status ujian, juga tidak menunjukkan perbedaan mutu yang signifikan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap lembaga pendidikan yang disebut madrasah baik negeri maupun swasta, sehingga madrasah bisa berpartisipasi secara aktif untuk mencerdaskan bangsa. Dan pada akhirnya kualitas madrasah (MA) bisa sejajar dengan sekolah umum (SMA), dan mampu bersaing dengan siswa dari sekolah umum serta mampu mewarnai dunia pendidikan di Indonesia.

Bentuk perhatian dari pihak yang berkompeten terutama pemerintah yang vital untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, harus dilihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di Indonesia. Dari beberapa masukan ilmiah dari para ahli, pemerintah tak berdiam diri dan telah banyak melakukan terobosan-terobosan baru, dengan maksud tujuan pendidikan nasional bisa tercapai.

Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum dapat secara langsung memberikan efek/dampak perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain, seperti: Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Madrasah (BOM) dan Bantuan Khusus Murid (BKM).

Upaya pemerintah yang begitu mahal belum menunjukkan hasil menggembirakan. Ada yang berpendapat mungkin manajemennya yang kurang tepat dan ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah kurang konsisten dengan upaya yang dijalankan. Oleh karena itu, kembali pada apa yang disebut sebagai kekayaan lokal, bahwa tidak sepenuhnya apa yang dapat dipraktikkan dengan baik di luar negeri bisa 100% (seratus persen) juga berhasil di Indonesia, semua itu membutuhkan tahapan, namun dengan kerangka yang jelas dan tidak dibebani oleh proyek yang demi kepentingan sesaat atau golongan.

Mutu Madrasah dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Dari hasil analisis korelasi sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa faktor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai korelasi yang signifikan dengan *output* pendidikan (hasil UN) dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam usaha peningkatan mutu madrasah.

Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (<http://kafeilmu.co.cc/2010/09/cara-bagaimana-meningkatkan-mutu-pendidikan#ixzz1GTGatuDK>):

1. Memberikan Penghargaan

Penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan SDM karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi. Guru akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (misal: tunjangan profesionalisme) maupun penghargaan intrinsik (misal: pengakuan, kesempatan dan pengembangan karir).

Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (*hierarchy of needs*) yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman (terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat),

kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat.

Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Meningkatkan Profesionalisme Pendidik

Kurikulum dan panduan manajemen sekolah sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional. Karena itu tuntutan terhadap profesionalisme guru yang sering dilontarkan masyarakat dunia usaha/industri, legislatif, dan pemerintah adalah hal yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana.

Konsep tentang guru profesional selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Sebagian besar tentang indikator itu sudah diperoleh di LPTK

Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi terhambat karena ketidakmampuan guru secara finansial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (*skill labour*) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi.

UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Uraian pasal 42 itu cukup jelas bahwa untuk menjadi guru sebagai tahapan awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan/umum dan memiliki akta mengajar). Setelah guru memenuhi persyaratan kualifikasi, maka guru akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi. Namun, fenomena menunjukkan bahwa pendidik di sekolah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini

mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan guru sangat mudah untuk dimasuki oleh siapa saja.

3. Mutu Madrasah dan Sarana Prasarana

Dari hasil analisis sebelumnya juga menunjukkan bahwa sarana prasarana merupakan salah satu aspek SNP yang mutunya masih “rendah”, dan sarana prasarana pula yang mempunyai keterkaitan dengan output (hasil UN). Oleh karena itu, hendaknya perhatian pemerintah terhadap kualitas dan kuantitas sarana prasarana perlu ditingkatkan dan berikan sarana prasarana yang layak.

Dengan diberlakukannya kurikulum KTSP, kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata. Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan). Oleh karena setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana prasarana yang memadai.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam bab VII pasal 42 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diharapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah tidak “kebablasan cepat” dan “keterlalu tertinggal” di bawah persyaratan minimal, yang mengakibatkan kualitas pendidikan semakin terpuruk.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 45 ayat (1) berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jika kita lihat kenyataan di lapangan bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan SPM, umumnya sekolah negeri dan swasta favorit. Berdasarkan fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana pada madrasah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan kepada masyarakat.

Menyikapi keadaan yang demikian sulit, apalagi kondisi negara yang kian kritis, solusi yang ditawarkan adalah memanfaatkan seluruh potensi sumber daya sekolah dan masyarakat sekitar, termasuk memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Mudah-mudahan dengan sistem anggaran pendidikan yang mengacu pada UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 46 dan 49 permasalahan ini dapat diatasi dengan membangun kebersamaan dan kepercayaan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan melandaskan pada cita-cita luhur pendidikan, diharapkan mutu madrasah terus meningkat dan terjadi perkembangan pada perbaikan yang terus menerus.

PENUTUP

Kesimpulan

Mutu Madrasah Aliyah di Propinsi Riau, secara umum relatif sama dan tidak jauh berbeda antara madrasah negeri maupun madrasah swasta. Hal ini menunjukkan, bahwa kualitas lembaga pendidikan swasta tidak jauh berbeda dengan madrasah negeri, yang fasilitas dan sarana prasarananya lebih memadai

Kualitas/mutu SNP dilihat dari masing-masing aspek/standar menunjukkan perbedaan 2 (dua) kategori, yaitu B dan C, dan tidak ada satupun aspek SNP yang kategori mutunya mencapai A (Sangat Baik). Standar Isi, standar proses, standar pengelolaan dan standar penilaian kategori mutunya adalah B (Baik). Sementara standar lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana serta standar pembiayaan, kategori mutunya C (Cukup).

Bila dilihat dari masing-masing aspek SNP, terdapat 2 (dua) aspek yang mempunyai korelasi dengan *output* (hasil UN), yaitu standar tenaga pendidik dan kependidikan dan standar sarana prasarana. Pendidik, memang faktor utama yang sangat berperan dalam proses pembelajaran. Dengan kondisi guru yang berkualitas, akan memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar, termasuk hasil UN yang dicapai. Sarana prasarana juga memiliki korelasi dengan *output*. Apabila sarana prasarana ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, maka akan memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap *output*.

Banyak faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencapaian SNP, baik dari dalam maupun dari luar. Terkait dengan adanya beberapa penghambat, telah dilakukan upaya dalam pencapaian SNP.

Saran

1. Peta mutu madrasah yang cukup bervariasi dan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara MAN dengan MAS. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam program pendidikan, baik melalui pemberian bantuan fisik maupun non fisik. Misal; dalam penyelenggaraan pelatihan bagi guru, tidak hanya dikhususkan bagi guru yang berasal dari madrasah negeri, tapi juga mencakup guru-guru dari madrasah swasta.
2. Faktor pendidik sebagai pemegang peran utama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidik perlu terus diupayakan. Guru yang sudah tersertifikasi perlu segera dievaluasi, sehingga dampak positif segera diketahui.

3. Dalam penentuan kebijakan terutama dalam pengembangan madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama perlu lebih memperhatikan hasil-hasil penelitian dan kajian-kajian akademik. Seperti penelitian pemetaan kemampuan siswa dan lulusan madrasah yang berkaitan dengan mutu.
4. Hasil pemetaan ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola madrasah untuk menentukan fokus dan konsentrasi dalam mengembangkan program yang menjadi prioritas dikembangkan sesuai dengan potensi siswa. Dengan demikian, akan ada madrasah yang mungkin hanya akan menerima murid di jurusan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Islam. 2008. *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jendral Pendidikan Islam.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI. 2009. *Rencana Strategik, Pembangunan Pendidikan Islam 2010 – 2014*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI
- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2005. *Perencanaan Madrasah Mandiri*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Syaifuddin, Mohammad, dkk. 2007. *Bahan Ajar Cetak Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No 78/2009 tentang Pengelolaan Pendidikan Bertaraf Internasional

Website

- <http://kafeilmu.co.cc/2010/09/cara-bagaimana-meningkatkan-mutu-pendidikan#ixzz1GTGatuDK>, diakses tanggal 28 Januari 2009.
- <http://mazzbudy.Multiplay.com/journal/item/8/>, *Pemberlakuan Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan*, diakses tanggal 28 Januari 2009.